

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM  
DI SEKOLAH AL-KHUSYU' DESA TUGUREJO  
KECAMATAN WATES KABUPATEN BLITAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh

**FAJAR TRIANTO**

**NPM 21801091007**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**2022**

## ABSTRAK

Fajar Trianto, 2022, NPM 21801091007, Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Implementasi Kebijakan Kurikulum di Desa Tugurejo Kec. Wates Kab. Blitar. Dosen Pembimbing I : DR. Nurul Umi Ati, M.AP, Dosen Pembimbing II : Drs. Agus Zainal Abidin, M.Si

---

Penelitian Ini dilakukan atas dasar adanya kesenjangan pelaksana terhadap implementasi kebijakan kurikulum sekolah, cenderung lemah dan tidak konsisten. Maka dari itu untuk mengatasi hal tersebut Sekolah Al-khusyu' di Kec. Wates Kab. Blitar melakukan pengembangan kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai bahan implementasi kebijakan sekolah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan kurikulum dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Untuk mengetahuinya maka digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran data online.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi kebijakan KTSP sudah terealisasi dengan baik. Lebih dalam, Implementasi kebijakan kurikulum di sekolah Al-khusyu' Kabupaten Blitar masih belum optimal. Hal tersebut ditinjau berdasarkan 6 variabel model implementasi yang di kemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yakni; Standar dan tujuan kebijakan, Sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi atau sikap pelaksana, lingkungan sosial dan ekonomi. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan kurikulum dilokasi tersebut yakni; Kebijakan Pimpinan Pembuat Kurikulum, Sumber daya finansial, sarana dan prasarana, Adapun faktor penghambatnya ialah; SDM (Pelaksana) dan mutu tenaga pendidik.

Rekomendasi yang diberikan kepada Pengambil Kebijakan yakni untuk melakukan kegiatan pendampingan pelaksanaan KTSP. Adapun kepada Guru yaitu membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berkelanjutan dengan pelaksanaan Kelompok Kerja Guru (KKG) lintas sekolah.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu bangsa merupakan sebuah komponen yang sangat penting dalam membentuk suatu sistem keorganisasian untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dimana Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran utama dalam sebuah proses perencanaan, kepemimpinan, pengorganisasian, pengendalian dan macam-macam pemeranan proses lainnya. Sumber daya manusia menjadi komponen pokok yang menentukan kecepatan dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu bangsa, Guna mewujudkan pembangunan bangsa maka dalam hal tersebut sangat diperlukan adanya pendidikan dimana pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu aset sekaligus investasi modal manusia (human capital investment). Dalam Spektrum ini, pendidikan merupakan suatu instrument negara yang sangat krusial dan esensial dalam memberikan kontribusi sumber daya manusia untuk membangun masyarakat yang berperadapan dan maju dimana akhir muaranya yang tak lepas dari landasan agama yang di implementasikan dalam ruang publik atau sosial (*social action*).

Pemerataan Pendidikan terhadap semua lapisan bermasyarakat harus di perhatikan secara khusus dalam dunia publik, mengingat pemerataan pendidikan selain amanat dari pada undang-undang, namun di sisi lain pendidikan merupakan wujud implementasi kehidupan yang telah tertuang

dalam risalah Islam di Al-quran yang harus di junjung tinggi. Allah berfirman dalam Qur'an Surah Al-Muzadallah 58: 11 yang berbunyi:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah ﷻ Akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah ﷻ Akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah ﷻ Mahateliti apa yang kamu kerjakan”

Pada suatu bangsa pendidikan memiliki peran yang tidak saja menunjukkan sebuah tingkat peradabannya, melainkan juga mencerminkan terhadap kualitas suatu bangsa sebagai manusia yang berdaulat, bermartabat, dan mampu berkompetisi dengan baik dalam kehidupan dalam tingkat regional, nasional, maupun Internasional. Bangsa juga memiliki adanya kualitas yang tidak akan terlepas dari kualitas pendidikan, kesehatannya, kesejahteraan bahkan hingga pada kualitas morilnya.

Lembaga pendidikan mengemban amanah untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bertahan hidup dan membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku secara lokal, nasional, dan global atau humanisasi (Tilaar, 2012). Lembaga pendidikan berperan sebagai implementor yang menjadi pusat pembentukan karakter, potensi, penghayatan, pengembangan, dan pembentuk jati diri yang kultural terhadap lingkungan sekitar bermasyarakat bangsa dan negara. Setiap bangsa mempunyai rencana sebagai susunan strategi melalui suatu sistem pendidikan nasional untuk pembangunan bangsa dan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki seperangkat karakter, keahlian juga kompetensi yang berbeda-beda untuk berkontribusi

dalam lingkungan sosial dan berperan aktif dalam mewujudkannya berdasarkan nilai pancasila yang adil dan beradap. Pada hakikatnya Sistem pendidikan nasional menjadi cerminan dari upaya sadar bangsa untuk membangun warisan budaya dan jati diri untuk membangun bangsa yang berdaulat dan bermartabat.

Melalui pendidikan seorang dapat tumbuh dewasa, karena pendidikan memiliki sistem pengajaran yang efektif dalam memberikan dampak positif bagi generasi muda bangsa, selain itu pendidikan juga sangat membantu dalam mengatasi problem anak usia dini yang buta huruf atau belum mengenal huruf dan memberikan sebuah keterampilan, kemampuan mental, interaksi dan lain sebagainya. Seperti yang tertera didalam UU No.20 tahun 2003 menerangkan bahwa pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar yang aktif atau setiap peserta ikut berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar untuk mengembangkan kemampuan diri masing-masing peserta baik dalam basic spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan Negara.

Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan Nasional Indonesia mengatakan pendidikan tersebut adalah merupakan tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, Menurut Heidjrachman dan Husnah (1997:77) pendidikan adalah.

“Suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk di dalam peningkatan penguasaan teori dan keterampilan, memutuskan dan mencari solusi atas persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan di dalam mencapai tujuannya, baik itu persoalan dalam dunia pendidikan ataupun kehidupan sehari-hari.”

Sedangkan menurut Notoadmodjo (2003:77), kalau pendidikan formal dalam suatu organisasi merupakan suatu proses pengembangan kemampuan kearah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 31 ayat 1 tentang hak dan kewajiban pendidikan yang berbunyi “menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”. Harapan tersebut kemudian menjadi rumusan dalam pengupayaan pelayanan pendidikan generasi bangsa yang bertujuan sebagai pendidikan Nasional yang tertera pula dalam Undang-Undang pasal 4 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi.

“Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa.”

Kurikulum merupakan suatu elemen strategis yang ada dalam sebuah layanan program pendidikan dan komponen pendidikan yang menjadi acuan standar layanan pendidikan terhadap pihak-pihak yang berada dalam penyelenggaraan program atau satuan pendidikan, baik sebuah program yang dilakukan oleh pengelola maupun penyelenggara, khususnya oleh tenaga pengajar/jajaran guru dan kepala sekolah. Kurikulum dan pendidikan memiliki relasi yang sangat erat dan sejarah dimana kurikulum menjadi pendoman yang memberikan arah tujuan pendidikan, dan pendidikan adalah penerapan dari



adanya kurikulum tersebut. Antara kurikulum dan pendidikan memiliki tujuan yang saling berhubungan, apabila masing-masing tujuan tersebut hendak tercapai, maka kurikulumlah sebagai sarana yang berisi pendoman pendidikan, yang dijadikan sebagai dasar acuan pendidikan yang relevan dengan kurikulum tersebut, hal itu dapat diartikan bahwa kurikulum dapat mengantarkan sebagai penyelenggara program menuju arah capaian tujuan pendidikan.

Pendidikan sebagai implementasi dari adanya kurikulum seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pasal 36 ayat (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar Nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Munculnya kebijakan pemerintah Indonesia tentang pendidikan yang bersifat sentralistik yaitu penyerahan kekuasaan dan wewenang pemerintahan secara penuh kepada pemerintah pusat. Kemudian berubah ke pendidikan desentralistik yang dilatar belakangi oleh perubahan dan beberapa tuntutan masyarakat dalam dimensi global.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 merupakan kurikulum lama yang kini telah berganti menjadi kurikulum 2013 sebagai kurikulum baru hingga saat ini. Kurikulum 2013 merupakan hasil dari evaluasi pemerintah dalam menyempurnakan kurikulum lama dengan tujuan untuk membantu pencapaian pendidikan yang lebih di harapkan kedepan. Kurikulum 2013 dibuat dengan beberapa timbangan yang sangat memerhatikan seperti apa

pergerakan pendidikan kedepan dengan tujuan untuk membekali para pelajar Indonesia dengan wawasan teori dan keahlian dalam praktik agar memiliki kemampuan dalam kepemimpinan diri, keluarga, masyarakat dan bangsanya. Tidak hanya itu kurikulum 2013 juga sangat mendukung pergerakan para pelajar untuk menumbuhkan diri yang aktif, inovatif, kreatif, interaktif dan mampu berkontribusi dengan baik dengan lingkungannya dalam bermasyarakat, bangsa, negara dan peradaban dunia. Dengan tujuan kurikulum 2013 tersebut, diharapkan para tenaga pendidik mampu menunjang standar kompetensi lulusan dengan sebuah peningkatan dan keseimbangan antara soft skills dan hard skills yang meliputi beberapa aspek kompetensi yaitu sikap (afektif), keterampilan (psikomotor) dan pengetahuan (kognitif).

Sebagai pada kutipan penyampaian di atas bahwa kurikulum 2013 dibuat untuk menjadi penyempurna kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Hal tersebut dikarenakan rata-rata kemampuan berpikir individu anak Indonesia secara ilmiah dianggap masih dibawah standar. Menurut hasil dari studi lembaga survei pendidikan International, *Trends In International Mathematic and Science Study (TIMSS)* dan *Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)* 2011 dalam hasil perhitungannya menunjukan tidak adanya perkembangan yang signifikan terhadap kemampuan siswa-siswi di Indonesia.

Hasil studi TIMSS pada tahun 2007 dan 2011 menunjukan kemampuan siswa-siswi indonesia dalam perhitungan matematika tidak ada peningkatan. sebagian besar siswa-siswi indonesia kesulitan dalam mengerjakan soal mulai



dari menengah ke atas, dikarenakan adanya perbedaan antara bahan ajar standar nasional dengan yang di ujikan tingkat international, begitu pula yang terlihat dalam bidang sainsnya. Hal tersebut diduga bahwa adanya ketidaksesuaian antara kompetensi dasar KTSP dengan materi yang tersedia di TIMSS. Sehingga perubahan kurikulum akan disempurnakan dengan adanya kurikulum baru yaitu dalam kurikulum 2013, dimana kompetensi dasar yang tersedia akan tetap berjalan dengan mengikuti standar kompetensi lulusan.

Pada kurikulum 2013 ini, tujuan pembelajarannya dilakukan suatu kajian terdahulu yang kemudian diikuti dengan komponennya. Berbalik arah dari kurikulum sebelumnya dimana standar kompetensi terletak dibelakang tanpa melakukan kajian khusus untuk menyediakan komponen-komponen yang berlaku dalam pembelajaran. Dalam kurikulum 2013, pemeran pendidikan lebih pada guru yang menjadi implementor isi dari kurikulum 2013 tersebut, dengan tujuan menciptakan pola pembelajaran yang terprosedur sehingga peserta didik dapat mencapai pengetahuan (kognitif), Sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotor) untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. kekuatan mental dan komitmen yang tinggi para guru sangat dibutuhkan dalam memaksimalkan implementasi kebijakan kurikulum yang berlaku. Proses implementasi kebijakan kurikulum 2013 untuk jasa pengajar telah disiapkan silabusnya dari pusat sehingga para guru tidak perlu lagi membuat silabusnya. silabus dibuat oleh pusat dikarenakan melihat kemampuan para guru yang berbeda-beda, tidak dapat disamakan dengan yang lainnya dalam membuat silabus sehingga pada kurikulum KTSP banyak guru

yang hanya menyalin silabus dari media lain dan hasilnya tentu beragam karena masing-masing individu satuan pendidikan memiliki silabus yang berbeda-beda.

Problematika dalam segala aspek kehidupan merupakan hal yang lazim dan menjadi batu locatan bagi implementor dengan representasi dari sisi lemah atau tertinggalnya suatu lembaga dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini, tertuju pada kasus permasalahan yang ada di wilayah Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar. Kondisi pendidikan pada wilayah Kabupaten Blitar ini masih tergolong rendah, hal tersebut di sebabkan perbandingan dari minimnya pendapatan orang tua dengan kebutuhan salah satunya adalah kebutuhan pendidikan. Kondisi tersebut diterangkan oleh Antosius Triono, warga Desa Wates Kabupaten Blitar, yang menyekolahkan anaknya di SMKN 3 Kota Blitar. Saat dikonfirmasi disela-sela menunggu anaknya yang menjalani tes, ia mengaku dari rapat bersama guru dan calon wali murid kemarin diketahui biaya masuk sekolah ini jika positif diterima, mencapai dua juta rupiah. Nominal tersebut dianggap masih terlalu berat untuk penduduk Kecamatan Wates yang mayoritas profesinya adalah petani Sehingga pihaknya meminta adanya keringanan.

Kondisi tersebut menarik prihatin Nuhan Eko Wahyudi, selaku Sekretaris Komisi I DPRD Kota Blitar. Pihaknya menuturkan bahwa telah menerima beberapa keluhan yang di alami oleh orang tua/wali murid. diketahui Pusat Sumber Belajar (PSB) tingkat SDN bisa mencapai 200.000,00 sementara SMKN mencapai 2.000.000,00 Perbandingan nominal yang tak sebanding

dengan Umpah Minimum Kabupaten UMK yang di Kota Blitar yang mencapai sekitar 660.000,00 ribu (Sumber : <https://blitarkota.go.id/kan-biaya-psb>).

Keberadaan Sekolah (berbasis Pesantren) Al-khusyu' berupaya menjembatani penduduk wilayah Kabupaten Blitar untuk mendapatkan haknya dalam ranah pendidikan. Sekolah Al-khusyu' merupakan Sekolah berbasis pesantren yang terdiri dari beberapa tingkat Pendidikan yakni Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada penelitian pada Madrasah Ibtidaiyah (MI). Lembaga sekolah Al-khusyu' memiliki program Pendidikan yang menggratiskan seluruh peserta didik dalam menempuh pendidikannya. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Husnul (2020), “4 tahun usia sekolah pesantren gratis Alkhusyu' SC malang ada di Tengah-tengah masyarakat di Desa Tugurejo Kecamatan Wates” (sumber:<http://alkhusyuwates.com/2020/03/>). Dikabarkan oleh beberapa implementor kebijakan Sekolah terdapat beberapa isu mengenai kesenjangan pelaksana terhadap implementasi kebijakan yang cenderung tidak konsisten. sekolah yang masih berusia muda ini menjadi sasaran peneliti dalam penelitian bagaimana implementasi kebijakan kurikulum pemerintah maupun mandiri. Hal tersebut dikarenakan SDM yang masih minim, sarana dan prasarana yang terbatas, dan lebih khusus adalah usia sekolah yang dikategorikan muda dan sedang berada dalam tahap merintis upaya implementasi mencocokkan antara kondisi dan keadaan daerah sekitar dengan kebijakan kurikulum yang berlaku.

Mengenai hal tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian pada upaya implementasi kebijakan kurikulum. Para guru dan kepala sekolah sebagai pemegang amanah pendidikan harus memaksimalkan tugasnya dengan upaya dan evaluasi sebagai implementor kurikulum yang berlaku. Tenaga pengajar sekolah harus mendukung penuh kebijakan pemerintah pendidikan tentang kurikulum sekolah, terkhusus sekolah muda Al-khusyuk Kabupaten Blitar agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Bentuk dukungan dan persiapan lebih tenaga pendidik dapat berupa implementasi itu sendiri dengan mempersiapkan diri dalam memahami silabus, membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan baik dan benar, menyiapkan materi/bahan ajar, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebijakan kurikulum yang berlaku, evaluasi implementasi pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lainnya termasuk sikap mental untuk implementasi kebijakan kurikulum yang efektif dan mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Beberapa hal penting pada tenaga pendidik adalah sudah mengikuti pelatihan sosialisasi tentang kebijakan kurikulum yang sedang berjalan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/kota Blitar ataupun Kementrian Agama Kab/Kota Blitar.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah tertulis di atas, maka peneliti mengambil beberapa rumusan masalah sebagai isi dalam pembahasan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Kurikulum di Sekolah Al-khusyuk Desa Tugurejo Kab. Blitar ?

2. Apa Faktor pendukung dalam Implementasi kebijakan Kurikulum di Sekolah Al-khusyu' Desa Tugurejo Kab. Blitar?
3. Apa Faktor penghambat dalam Implementasi kebijakan Kurikulum di Sekolah Al-khusyu' Desa Tugurejo Kab. Blitar?

### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam proses pengumpulan data, untuk menghindari terjadinya bias dalam proses pengambilan data maka perlu adanya batasan-batasan penelitian yang di fokuskan melalui indikator-indikator sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Kurikulum di Sekolah Al-khusyu' Desa Tugurejo Kab. Blitar :

Untuk mengukur keberhasilan terhadap proses Implementasi Kebijakan Kurikulum di Sekolah Al-Khusyu' Desa Tugurejo Kec.Wates Kab. Blitar, penulis menggunakan pendekatan Implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam 6 variabel :

1. Standar dan sasaran kebijakan (Kurikulum)/ ukuran dan tujuan kebijakan (Kurikulum)
2. Sumber daya (Manusia, Finansial, Waktu)
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
5. Disposisi atau sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial dan ekonomi

2. Faktor Pendukung dalam Implementasi kebijakan Kurikulum di Sekolah Al-khusyu' Desa Tugurejo Kab. Blitar.

1. Kebijakan Pimpinan Pembuat Kurikulum
2. Sumber Daya Finansial
3. Fasilitas/ Sarana dan Prasarana

3. Faktor Penghambat dalam Implementasi kebijakan Kurikulum di Sekolah Al-khusyu' Desa Tugurejo Kab. Blitar.

1. Sumber Daya Manusia (Tenaga Pendidik)
2. Mutu Tenaga Pendidik

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Kurikulum di Sekolah Al-khusyuk Desa Tugurejo Kec. Wates Kab. Blitar.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum di Sekolah Al-khusyu' Desa Tugurejo Kec. Wates Kab. Blitar.
3. Untuk mengetahui, Mendeskripsikan, dan mengalasis faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum di Sekolah Al-khusyu' Desa Tugurejo Kec. Wates Kab. Blitar

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis



- (a) Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana baru bagi penulis untuk dapat dituangkan dalam penulisan karya ilmiah di bidang Ilmu Administrasi khususnya dalam ilmu Kebijakan Publik.
- (b) Untuk meningkatkan pemahaman dari teori-teori yang terkait dengan penelitian penulis selama berada di dalam bangku perkuliahan fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.
- (c) Diharapkan hasil penulisan karya ilmiah ini dapat membantu sekaligus menjadi rujukan pada kegiatan penelitian yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

- (a) Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan pendidikan di sekolah Al-khusyu kel. Tugurejo kabupaten Blitar
- (b) Dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran bagi Lembaga pendidikan di Indonesia khususnya Lembaga pendidikan Sekolah Al-khusyu' di Desa Tugurejo Kab. Blitar.

## BAB VII

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis temukan Berdasarkan Penjelasan pada hasil temuan dan pembahasan penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Kurikulum di Sekolah Al-Khusyu' Desa Tugurejo Kec. Wates Kab. Blitar terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada enam variabel Model Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975), yakni; Standar dan tujuan Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Komunikasi antar Organisasi, Disposisi/ Sikap pelaksana serta Lingkungan sosial dan ekonomi.
2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah Al-Khusyu' Desa Tugurejo Kec. Wates Kab. Blitar mengacu pada Keputusan Menteri Agama (KMA) 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi (Kebijakan) kurikulum pada madrasah.
3. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan kurikulum di Sekolah Al-Khusyu' Desa Tugurejo Kec. Wates Kab. Blitar adalah Kebijakan Kurikulum Sekolah; telah disusun dengan matang, sumber daya finansial; berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan para donatur, serta sarana dan prasarana; yang memadai pelaksanaan kurikulum sekolah.

4. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kurikulum di Sekolah Al-Khusyu' Desa Tugurejo Kec. Wates Kab. Blitar yakni sumber daya manusia/pelaksana; masih minim/terbatas, dan mutu tenaga pendidik; masih belum memenuhi standar kualifikasi tenaga pendidik.

### **B. Saran**

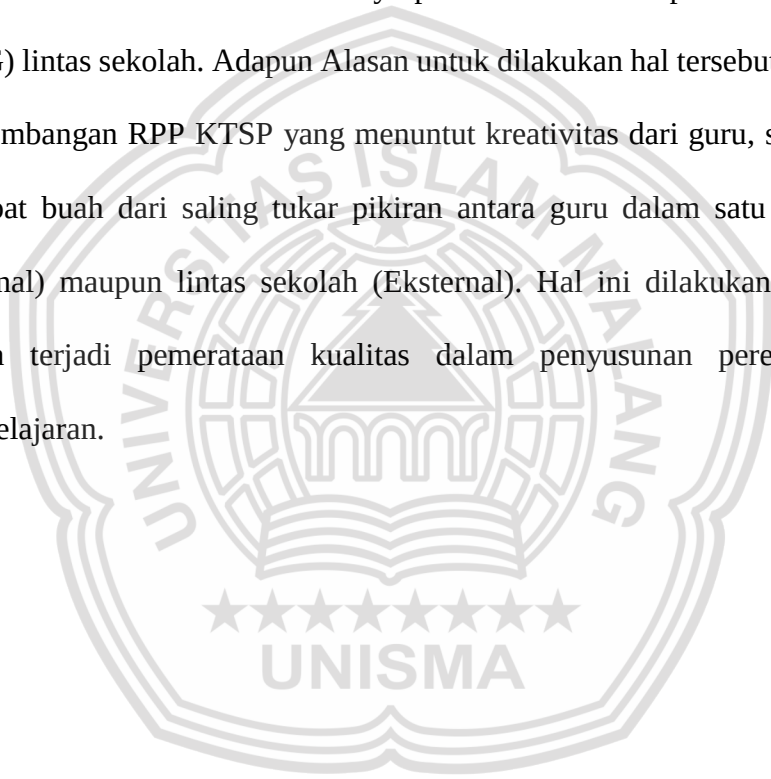
Berdasarkan temuan hasil penelitian yang telah diuraikan, bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan khususnya dalam memaksimalkan layanan pendidikan di Sekolah Al-Khusyu' Desa Tugurejo Kec. Wates Kab. Blitar. Maka beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Pada pimpinan Lembaga Pendidikan Sekolah Al-Khusyu' Desa Tugurejo Kec. Wates Kab. Blitar untuk dapat merekrut tenaga pendidik tetap yang berkompeten sehingga para pelaksana dapat menemukan titik fokus dalam tugas dan tanggung jawab yang diemban.
2. Pada pelaksana kebijakan Sekolah Al-Khusyu' Desa Tugurejo Kec. Wates Kab. Blitar, untuk lebih menguatkan komitmen agar tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan selalu terjaga.

### **C. Rekomendasi**

Berdasarkan pelaksanaan kebijakan kurikulum di Sekolah Al-khusyu' Desa Tugurejo Kec. Wates Kab. Blitar. Beberapa rekomendasi yang diberikan kepada pengambil kebijakan dan guru yaitu:

1. Pengambil keputusan, Tim agen pelaksana harus melakukan optimalisasi kegiatan pendampingan sehingga pelaksanaan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bisa terpantau secara berkala.
2. Terdapat catatan yang harus diperhatikan oleh para guru yaitu pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Perlunya pelaksanaan Kelompok Kerja Guru (KKG) lintas sekolah. Adapun Alasan untuk dilakukan hal tersebut, karena pengembangan RPP KTSP yang menuntut kreativitas dari guru, sehingga terdapat buah dari saling tukar pikiran antara guru dalam satu sekolah (Internal) maupun lintas sekolah (Eksternal). Hal ini dilakukan dengan tujuan terjadi pemerataan kualitas dalam penyusunan perencanaan pembelajaran.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bernadetta, Sari, Dewi dkk. 2021. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Lismina. 2018. *Pengembangan Kurikulum di Sekolah dan Perguruan Tinggi*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Martono, Deni. 2021. *Blitar Dalam Angka*. Blitar. BPS Kabupaten Blitar
- Moleong, Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: PMN.
- Widodo, Joko. 2021. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: MNC Publishing.

### Dokumen :

- Dokumen I. 2021. *Tentang Kurikulum MI Al-Khusyu' Madrasah Tahfidhul Qur'an*. Blitar. Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Blitar.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 184. 2019. *Tentang Implementasi Kurikulum Pada Madrasah*. Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019. Jakarta. Direktorat Jendral Jakarta.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 183. 2019. *Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah*. Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019. Jakarta. Direktorat Jendral Jakarta.

### Undang-undang :

- Undang-undang Nomor 20. 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 ayat 1*.
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1. *Tentang Hak dan Kewajiban Pendidikan*.
- Undang-undang Nomor 2 pasal 4. 1989. *Tentang sistem pendidikan Nasional*.

**Jurnal :**

Ade, Motoyo, Isdairi. 2014. *Implementasi Kebijakan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 di Kota Pontianak*. Pontianak: Universitas Tanjungpura Pontianak.

Izzan, Abdullah Habubuddin. (2017). *Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Dasar di Kota Bandung pada Dinas Pendidikan Kota Bandung*. Bandung: Universitas Pasundan Bandung.

Jaka, Rastini. 2020. *Implementasi Kurikulum Darurat di Masa Pandemi Covid-19 dalam Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Penti. 2019. *Implementasi Manajemen Strategis dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTS Negeri 1 Bandar Lampung*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Sholahudin, Dadang. 2018. *Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Banyumas dan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Nu 01 Pageraji Cilongok Kabupaten Banyumas*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

**Internet:**

Kabupaten Blitar. 2016. *Masalah-masalah Pembangunan di Kabupaten Blitar*. <http://pdiperjuangan-jatim.com/masalah-masalah-pembangunan-di-kabupaten-blitar/> (Diakses, 25 Januari 2016)

Blitar Kota. 2010. *Wali Murid Keluhkan Biaya PSB*. <https://blitarkota.go.id/id/berita/wali-murid-keluhkan-biaya-psb> (Diakses, 07 Juli 2010)

Husnul. 2021. *Pembangunan Tempat Wudhu*. <http://alkhusyuwates.com> (Diakses, 13 September 2021)